BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam hukum kata sebutan “Tanah” dipakai dalam arti yuridis yaitu permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang mempunyai batas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹ Tanah yang diberikan kepada masyarakat dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh hukum agraria adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya hanya terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah dan air serta ruang yang ada diatasnya. Oleh karena itu dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Terlihat adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan tanah dan bangunan perumahan; semuanya memerlukan tanah sebagai sarana utamanya. Diketahui bahwa tanah mempunyai arti yang penting sekali dalam hidup manusia,

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-12., (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 18

karena sebagian besar daripada kehidupan masyarakat tergantung pada tanah. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak, akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara-cara manusia dalam memperoleh tanah antara lain dengan jual-beli, penukaran, penghibahan atau pemberian dengan wasiat. Dalam hal ini hal yang akan penulis sampaikan adalah perihal penghibahan.

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada imbalan apapun. Dengan kata lain pemberian dengan cuma-cuma dan tidak bersyarat. Dalam hibah hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, orang yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah dan atau bangunannya untuk selama-lamanya kepada seseorang dan sejak itu hak atas tanah dan bangunan tersebut telah berpindah kepada yang menerima hibah tersebut, sama halnya dengan jual beli dan tukar menukar.

Penghibahan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPdt) Buku III Bab X dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut ketentuan Pasal 1666 KUHPdt yang dimaksud dengan pengertian “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”² Apa yang dapat

² R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-28 (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 436.

dihibahkan menurut ketentuan Pasal 1667 KUHPdt yang menyebutkan bahwa “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, sedangkan hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.”³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 171 huruf g menyatakan bahwa : “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”⁴ Sebagai suatu perjanjian, hibah itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat mengenai kasus pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok adanya isu hukumnya adalah tentang pemalsuan akta hibah yang dilakukan oleh Nyonya Suparti yang beranggapan bahwa tanah yang ia punyai adalah hasil warisan peninggalan suaminya tanpa ada pihak lain yang ikut memilikinya sehingga menyebabkan dibatalkannya Akta Hibah dan adanya gugatan ke pengadilan negeri oleh anak angkatnya yang juga merupakan ahli waris tanah tersebut yang mana dengan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut: bahwa Tuan ABDUL GAFFAR dan Nyonya SUPARTI adalah suami isteri dan sudah lama tidak mempunyai keturunan atau anak maka pasangan suami istri tersebut mengangkat Drs. H. SLAMET SUPRIJANTO kecil sebagai anak angkat yang diasuh dan dibesarkan serta disekolahkan oleh mereka berdua sehingga menganggapnya sebagai anak sendiri.

³ Ibid, hlm. 436.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), hlm.102.

Setelah Tuan ABDUL GAFFAR meninggal dunia Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO mengurus surat keterangan ahli waris almarhum yang menyatakan bahwa Ahli waris dari almarhum adalah Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO dan Nyonya SUPARTI maka terbitlah atas sebuah objek berupa sebidang tanah di Jalan Pangkalan Jati Baru Raya No. 60 RT.01/RW.04. Kecamatan Limo Kota Depok seluas 1.975 M² (seribu Sembilan ratus Tujuh puluh lima meter persegi) sertipikat hak milik atas nama mereka berdua yaitu Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO dan Nyonya SUPARTI.

Dalam pandangan Nyonya SUPARTI bahwa Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO adalah sekedar anak angkat yang tidak berhak mewarisi harta Almarhum, maka Nyonya SUPARTI berinisiatif untuk mengurus peralihan hak ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut juga PPAT) dalam bentuk hibah dengan cara merekayasa agar Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO menghibahkan tanah tersebut diatas kepada Nyonya SUPARTI sehingga bisa bebas menjual tanah peninggalan almarhum tersebut tanpa melibatkan Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO sebagai anak angkat juga sebagai ahli waris yang tertera dalam Sertipihat Hak Milik. Dan benar setelah dilakukan peralihan hak dengan cara hibah tersebut maka keluarlah Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Nyonya SUPARTI tanpa menyebutkan nama Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO.

Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO merasa sebagai ahli waris berdua dengan Nyonya SUPARTI dari almarhum Tuan ABDUL GAFFAR yang namanya

sama-sama tertera dalam Sertipikat Hak Milik tanah tersebut, tetapi obyek tanah tersebut sudah di jual ke pihak lain oleh Nyonya SUPARTI tanpa sepengetahuan Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO sebagai ahli waris bersama dengan cara hibah dalam peralihan hak atas tanah tersebut dengan memalsukan tanda tangan dari Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO dengan anggapan dari Nyonya SUPARTI bahwa Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO adalah anak angkat yang tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum suaminya.

Sehingga Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO tidak terima dan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri depok agar membatalkan sertipikat hak milik yang telah dialihkan dengan cara hibah dengan memalsukan tanda tangan darinya. Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO menganggap telah merugikan dirinya karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Untuk kepentingan tersebut diatas Tuan Drs.H.SLAMET SUPRIJANTO telah melaporkan perkara dengan dugaan penggelapan dan pemalsuan kepada kepolisian Resot Depok tanggal 28 Agustus 2008 juga telah melakukan pemblokiran 4 sertipikat hak milik tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanggal 11 Agustus 2006.

Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penulisan Tesis dengan Judul: **“PEMBATALAN AKTA HIBAH PASCA TERBITNYA SERTIPIKAT HAK MILIK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 14/PDT.G/2007/PN.DPK).**

2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan isu hukum atau rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum pembatalan akta hibah pasca terbitnya sertipikat hak milik?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak angkat pasca putusan pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Negeri Depok ?

3. Tujuan Penulisan

- 3.1 Mengkaji dan menganalisa akibat hukum pembatalan akta hibah pasca terbitnya sertipikat hak milik.
- 3.2 Mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum anak angkat pasca putusan pembatalan akta hibah oleh Pengadilan Negeri Depok.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 4.1 Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menganalisis khasanah ilmu kenotariatan.
- 4.2 Dari segi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :
 - 4.2.1 Bagi PPAT, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai PPAT.
 - 4.2.2 Bagi pihak masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan perjanjian akta hibah.

5. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian hukum dalam bentuk tesis dari berbagai universitas penyelenggara program studi magister kenotariatan yang membahas tentang Hibah.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Tyas Pangestu ⁵ /2009	Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.PT)''	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang

⁵ Tyas Pangestu, "Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.PT)", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

			pembatalan hibah?
2	Agustina Darmawati ⁶ /2009	“Analisis Yuridis atas Harta Gono- Gini yang di Hibahkan Ayah kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.691/Pdt.G/2007 /PA.Medan)”	1. Bagaimana keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit? 2. Bagaimana kedudukan ahli waris lain dari hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit? 3. Bagaimana pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit?
3	Endang Sri Wahyuni ⁷ /2009	“Pelaksanaan Pembatalan Hibah tanah oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah yang dilakukan secara onderhands ?

⁶ Agustina Darmawati, “Analisis Yuridis atas Harta Gono-Gini yang di Hibahkan Ayah kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.691/Pdt.G/2007/PA.Medan)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana, Universitas Sumatra utara, Medan, 2009.

⁷ Endang Sri Wahyuni, “Pelaksanaan Pembatalan Hibah tanah oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/PN.SMR)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

		Negeri No. 95/Pdt.G/2004/PN. SMR)”	2. Adakah hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah di pengadilan negeri semarang ?
--	--	--	---

6. Tinjauan Pustaka

Teori dipergunakan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.⁸ Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis.

Kerangka teori di maksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik di setuju atau tidak disetujui.⁹ Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁰ Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum.

⁸ JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas*, Penyunting M. Hisyam, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 203.

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 35.

Penelitian ini sendiri menggunakan teori tujuan hukum untuk menganalisa permasalahan yang akan di bahas nantinya. Dalam ilmu hukum ada 4 (empat) unsur yang merupakan pondasi penting yaitu : Moral, Hukum, Kebenaran, dan Keadilan. Tujuan dari hukum maka akan sangat banyak definisi yang di dapati, karena setiap ahli hukum akan memberikan definisinya sendiri-sendiri, sesuai situasi dan kondisi zamannya serta kepentingan-kepentingan saat itu.

Namun demikian tidak berarti bahwa tidak mempunyai pegangan dalam menelusuri hutan rimba daripada hukum, sama seperti orang berpakaian walaupun ada banyak jenis-jenis pakaian dengan berbagai model, tapi orang harus memilih salah satu pakaian yang di anggap cocok atau sesuai dengan tubuhnya, walaupun banyak pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum, namun hanya akan menggunakan beberapa pendapat tentang teori dari hukum, sesuai dengan tujuan penelitian ini dan sebagai landasan bagi penulisan selanjutnya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo, dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.¹¹ Kepentingan-kepentingan manusia itu bermacam-macam seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapat perlindungan hukum, kepentingan untuk mendapat kebahagiaan hidup lahir dan bathin dan sebagainya.

¹¹ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 11.

Menurut Muchsin sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.¹² Secara umum, Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup damai, maksudnya hukum menghendaki perdamaian yang semuanya bernuansa kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (*Law is tool of social engeneering*).¹³

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting”.¹⁴ Apa yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bukanlah tanpa alasan, bukti penting kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Meuwissen mengenai teori hukum “Ia memberikan suatu analisis

¹² Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

¹³ *Ibid*, hal. 11.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7

tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, selanjutnya ia menyibukan diri dengan hubungan antara hukum dan logika. Akhirnya ia memberikan suatu filsafat hukum dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum”.¹⁵

Sedangkan menurut JJ. H. Bruggink, “Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan. hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif”.¹⁶

Adapun dalam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Perjanjian dan Teori Kepastian Hukum.

6.1 Teori Hukum Perjanjian

Menurut R. Wiryono Prodjodikoro, “Hukum perjanjian ini ialah yang dalam bahasa belanda dinamakan *het verbintenissenrecht*...hukum perjanjian kini berarti luas, oleh karena meliputi hukum adat dan lebih sempit oleh karena hanya meliputi perjanjian yang bersumber pada persetujuan (*overeenkomsten*)...”.¹⁷

Masih menurut R. Wiryono Prodjodikoro, “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

¹⁵ Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 31

¹⁶ JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan B. Arief Sidharta), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 4

¹⁷ R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 2

melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁸ Menurut Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹⁹

Menurut M. Yahya Harahap, “Perjanjian/*verbinten*is adalah hubungan hukum/*rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum”.²⁰ Menurut S.B. Marh dan J. Soulsby, “Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum”.²¹ Menurut Abdulkadir Muhammad, “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.²² Menurut Herlien Budiono, “Pada prinsipnya perjanjian terbentuk secara konsensual, bukan formil. Bagi suatu perbuatan hukum satu-satunya yang dipersyaratkan ialah adanya kehendak yang tertuju pada suatu akibat hukum tertentu, yakni sebagaimana terejawantahkan dalam suatu pernyataan”.²³ Menurut Mariam Darus Badruzaman, “Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat

¹⁸ *ibid*, hlm. 4

¹⁹ Subekti, *op. cit.*, hlm. 1

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

²¹ S.B. Marh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, (Terjemahan Abdulkadir Muhammad), Alumni, Bandung, 2006, hlm. 93

²² Abdulkadir Muhammad, *Hk Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 225

²³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 374

secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan”²⁴

“Anggapan lain yang dikenal ialah bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Hal ini tidaklah demikian, kecuali dalam hal tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan. Mungkin sebagian orang sangat memerlukan supaya perjanjian itu dibuat secara tertulis, tetapi untuk tujuan praktis mengenai pembuktian”.²⁵

6.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*). Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 18

²⁵ S.B. Marh dan J. Soulsby, *op. cit.*, hlm. 93

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁶

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan, terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2(dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.²⁷

6.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2008), hlm. 158.

²⁷ M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hlm. 43

moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka

²⁸ Ibid, hlm.53.

²⁹ Ibid, hlm.54.

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹ Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³²

³⁰ Ibid, hlm.55.

³¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³³

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang

³³ Ibid. hlm.39

berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

7. Metode Penelitian

7.1 Tipe Penelitian

Jenis Penulisan dalam penulisan tugas ini adalah jenis penulisan normatif. Hal itu disebabkan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan bahan hukum untuk menemukan jawaban tersebut bahkan yang menjadi acuan bagi rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis mengacu pada buku-buku maupun literatur-literatur mengenai mengenai hukum perjanjian dan konsep hukum hibah.

7.2 Pendekatan Masalah

Untuk memahami pendekatan yang digunakan oleh penulis, perlu dipahami bahwa terlebih dahulu pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁴

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual juga digunakan oleh penulis untuk dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Hal ini dikarenakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada penulis tidak hanya berpacu kepada peraturan perundang-undangan saja akan tetapi juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum dari para sarjana atau pun doktrin-doktrin hukum.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133

Sebagaimana di kemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang.³⁵

b. Pendekatan Kasus

Selain pendekatan konseptual, pendekatan yang juga akan digunakan penulis untuk memecahkan rumusan masalah yang ada adalah dengan menggunakan suatu pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Depok No.14/PDT.G/2007/PN.DPK.

7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada adalah bahan hukum hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Selanjutnya, bahan hukum yang ada dibagi atas bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat”.³⁶ Mengikat disini adalah semua orang akan taat kepada bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

³⁵ *Ibid*, hlm. 178

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hlm. 13

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan UUJN
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
6. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Ttg Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah, makalah berbagai pertemuan ilmiah, hasil seminar, serta tesis.

7.4 Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan melalui penelusuran dan pencarian bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut akan diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan.

7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian

melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut sesuai permasalahan yang diajukan, setelahnya di sistematisasi, diinterpretasi, dianalisis dan dapat disimpulkan jawaban untuk memecahkan isu hukum atau rumusan masalah yang ada.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini ini dimulai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab sebagai berikut :

Pada Bab I pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada Bab II, akan menganalisa dan membahas Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Pasca Terbitnya Sertipikat Hak Milik.

Pada Bab III, akan menganalisa dan membahas Perlindungan Hukum Anak Angkat Pasca Putusan Pembatalan Akta Hibah oleh Pengadilan Negeri Depok.

Pada Bab IV Penutup, Penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dan saran sebagai alternatif permasalahan.